

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP)
TAHUN 2017**



**DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU**

JL. Kampus Kel. Mogolaing – Kota Kotamobagu 95711

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala bimbingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 telah tersusun sesuai dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Sakip merupakan bentuk laporan yang harus dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun sebagai pertanggung jawaban dan pengukuran capaian kinerja instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Target Kinerja SKPD, juga dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial .

Demikian LAKIP Tahun 2017 ini disusun, kiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Kotamobagu, Maret 2018

Kepala Dinas Sosial ✓
Kota Kotamobagu,



SARIDA MOKOGINTA, SH

PEMBINA

NIP. 19740815 200012 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD.....	1
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3. Sumber Daya SKPD	2
1.1.4. Kinerja Pelayanan SKPD	2
1.1.5. Perumusan Isu-isu Strategis	4
1.1.6. Analisis,Kekuatan,Kelemahan,Peluang dan Tantangan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategi	9
2.2. Indikator kinerja Utama.....	10
2.3. Rencana Kerja Tahunan	11
2.4. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Analisis Capaian Kinerja	13
BAB IV PENUTUP	24
 LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Sosial

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial

Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan persoalan yang terus berkesinambungan seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan aspek kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah, kesenjangan sosial, keterbelakangan, ketidakberdayaan, kemiskinan, konflik sosial, perlindungan hukum dan berbagai permasalahan lainnya yang memerlukan perhatian dan penanganan dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Kota Kotamobagu merupakan daerah perkotaan yang sangat rentan terhadap permasalahan Kesejahteraan Sosial sehingga Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menetapkan kebijakan penanganannya melalui Pembentukan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam penanganan permasalahan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini antara lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Kotamobagu merupakan instansi teknis yang mempunyai kewenangan melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam penanganan masalah Kesejahteraan Sosial dan. Keberadaan institusi ini merupakan penjabaran umum dari kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas umum Pemerintah khususnya Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial telah didesentralisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun demikian, permasalahan kesejahteraan sosial sangat kompleks, disamping itu kemampuan daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial masih terbatas dari berbagai aspek seperti tenaga profesional, pendanaan, sarana dan prasarana, sehingga diperlukan adanya keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

a. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah :

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.

b. Fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengkajian, dan evaluasi program pembangunan bidang kesejahteraan sosial .
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program bidang kesejahteraan sosial .
3. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial dan pembinaan hukum terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial .

4. Melaksanakan pembinaan kemitraan dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

1.1.3. Sumber Daya SKPD

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Unsur Pembantu Pimpinan :

 1. Sektetaris yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Unsur Pelaksana Teknis masing-masing :
 - a. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang membawahi :
 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti
 2. Kepala Seksi Penyadang Disabilitas, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang
 3. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 1. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan stimulan dan Penataan Lingkungan.
 3. Kepala Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
 3. Unsur Tenaga
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT)

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kotamobagu
Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1	Dinas Sosial	1	3	8		1	7	2		22

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kotamobagu
Berdasarkan Pendidikan

NO	SKPD	Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	SMA	SMP	
1	Dinas Sosial		1	16	5		22

1.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

1. Geografis

Secara Geografis Luas Kota Kotamobagu 184,33 km² 0⁰,0' Lintang Utara dan 123⁰ - 124⁰ Bujur Timur dengan batas–batas Wilayah : sebelah Utara Kecamatan Bilalang Kab. Bolaang Mongondow, sebelah Timur Kecamatan Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur, sebelah Selatan Kecamatan Lolayan dan sebelah Barat Kecamatan Passi Barat Kab. Bolaang Mongondow. Sedangkan Pembagian Wilayah Pemerintah di Kota Kotamobagu terdiri dari Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu

Timur, Kotamobagu Selatan dan Kotamobagu Barat yang menjadi Wilayah kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, dengan pembagian Wilayah Kelurahan/Desa seperti tabel berikut:

No	Kecamatan	Kel.	Desa	Jumlah	Ket
1.	KOTAMOBAGU UTARA	3	5	8	
2.	KOTAMOBAGU TIMUR	6	4	10	
3.	KOTAMOBAGU	3	6	9	
4.	SELATAN	6	-	6	
	KOTAMOBAGU BARAT				
	JUMLAH	18	15	33	

Pembagian luas wilayah untuk masing – masing kecamatan adalah :

Kecamatan Kotamobagu Utara	22,47 km ²	(12,19 %)
Kecamatan Kotamobagu Timur	65,98 km ²	(35,79 %)
Kecamatan Kotamobagu Selatan	85,27 km ²	(46,26 %)
Kecamatan Kotamobagu Barat	10,61 km ²	(5,76 %)

2. Kependudukan

Penduduk Kota kotamobagu berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012 berjumlah 122.738 jiwa, tersebar di empat kecamatan dan 33 Desa/Kelurahan dengan tingkat kepadatan rata-rata 539,90 km².Tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Kotamobagu Barat(3.218,38 km²) sedangkan terendah Kecamatan Kotamobagu Selatan (299,81 km²), dari jumlah keseluruhan penduduk di Kota Kotamobagu, penduduk miskin dari Tahun 2008 ke Tahun 2010 turun sebesar 57,27 % atau dari angka 27.959 menjadi 11.946 dan dari Tahun 2010 sampai Januari Tahun 2012 turun sebesar 4,53 % atau dari angka 11.946 menjadi 11.405 jiwa. Disamping data penduduk miskin tersebut, terdapat sebagian penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain meliputi : Penyandang Cacat, Eks Narapidana, Lanjut Usia/Jompo, Anak Terlantar/Putus Sekolah, PSK, Korban Narkoba, Gelandangan/Pengemis,dan permasalahan lainnya

3. Sosial Politik

Masyarakat Kota Kotamobagu ditinjau dari aspek Sosial–Budaya merupakan masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai etnis yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

NO.	ETNIS	%	KET
1.	Bolaang Mongondow	67,11	<i>Sumber : BPSKab. Bolaang Mongondow</i>
2.	Minahasa	13,49	
3.	Gorontalo	5,95	
4.	Sanger	3,01	
5.	Bolangitang	0,14	
6.	Jawa	2,44	
7.	Bintauna	0,02	
8.	Bali	0,26	
9.	Lainnya	7,57	
	JUMLAH	100	

Disamping terdiri dari berbagai etnis, masyarakat Kotamobagu merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dari setiap etnis. Adanya kehidupan sosial dan interaksi antara etnis yang sudah berlangsung sejak lama tersebut sangat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana hal ini dibuktikan dengan terpeliharanya kestabilan dan keamanan masyarakat.

Kondisi tersebut perlu diupayakan agar berlangsung secara berkesinambungan melalui kebijakan pemerintah yang kongkrit secara terpadu, terarah dan terencana dari setiap sektor termasuk sektor kesejahteraan sosial.

4. Ekonomi

Kota Kotamobagu merupakan barometer perekonomian Bolaang Mongondow dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Dikatakan demikian karena penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan swasta berpusat di Kotamobagu. Aspek pendukung tersebut adalah tersedianya berbagai sarana dan prasarana kelembagaan mulai dari skala nasional, regional dan daerah seperti perusahaan swasta, kelembagaan perbankan pemerintah dan swasta, lembaga ekonomi mikro, koperasi dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bentuk pemberian bantuan kredit usaha antara lain bagi koperasi dan usaha kecil menengah. Disamping itu program lainnya dari sektor antara lain meliputi pemberian bantuan kelompok tani, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan program lainnya telah mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya meningkatnya kemampuan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara layak.

1.1.5. Perumusan Isu- Isu Strategis

Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks. dikatakan demikian karena kedua permasalahan tersebut selalu nampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah kemiskinan. Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang berada pada kelas bawah (*lower class*) lebih besar dari kelas menengah (*middle class*) maupun kelas atas (*upper class*). Masyarakat yang berada pada kelas bawah, pada umumnya rentan terhadap masalah kemiskinan .

Berdasarkan data BPS Kota Kotamobagu tahun 2016 bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di Kota Kotamobagu mencapai $\pm 5,00$ %, sedangkan tingkat pengangguran mencapai 9,5 %. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih tetap memerlukan penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan tingkat pendapatan rendah karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, faktor sosial berkaitan dengan terbatasnya akses untuk memperoleh pekerjaan dan ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung, sedangkan faktor budaya berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang memiliki etos kerja yang rendah.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah sosial dan ketenagakerjaan masih belum maksimal, karena pada periode sebelumnya prioritas kebijakan pemerintah masih lebih diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik, sedangkan kebijakan sosial dan ketenagakerjaan belum mendapatkan alokasi yang memadai. Hal ini nampak pada pencapaian

target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang belum sesuai dengan apa yang direncanakan.

Untuk menangani permasalahan sosial di Kota Kotamobagu, Dinas Sosial Kota Kotamobagu selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan masalah sosial dan pengangguran telah melaksanakan identifikasi data bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada setiap tahun anggaran dengan tujuan agar penanganan masalah sosial akan lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data PMKS dan PSKS merupakan dasar yang digunakan dalam rangka penanganan masalah sosial dan ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Data teknis bidang sosial (PMKS dan PSKS)

- Data PMKS

PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi Keluarga Miskin, Masalah Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas (Cacat), Korban Narkotika, HIV/AIDS, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis, dll

- Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial.

1.1.6. Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

- Kekuatan

Jumlah, kualitas SDM dan keadaan wilayah merupakan kekuatan yang berpengaruh besar terhadap kemampuan Dinas Sosial dalam mencapai visi dan misinya, jika dilihat dari latar belakang pendidikan, ketrampilan dan pengalaman kerja, kekuatan SDM yang ada di Dinas Sosial diharapkan akan mampu menjawab semua tantangan dan menangani permasalahan yang ada dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

- Kelemahan

- Data yang belum akurat dan mutakhir yaitu data masyarakat miskin dan data pencari kerja selalu berubah-ubah sehingga dalam penanganannya sering mengalami kendala.
- Masih kurangnya dana yang dianggarkan
- Masih kurangnya jumlah personil yang ada di Dinas Sosial

- Peluang

- Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, untuk itu terus mengupayakan peningkatan pemberian bantuan bagi usaha-usaha kecil masyarakat kurang mampu

- Tantangan

Program Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 yang telah ditetapkan delapan kebijakan prioritas, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Infrastruktur
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional.

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pimpinan dan seluruh Staff Dinas Sosial Kota Kotamobagu. Visi Dinas Sosial Kota Kotamobagu :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan Untuk Semua”

B. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Mii sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mewujudkan Pengeliloan Kekayaan Budaya dalam rangka meningkatkan nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

2.1 Perencanaan Strategis

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Kotamobagu merupakan suatu pernyataan yang perlu dicapai secara konkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indicator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kotamobagu. Berbagai Indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur. Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan Antara tujuan, sasaran, dan indicator kinerja pada Dinas Sosial Kotamobagu.

**Tabel 2.1
Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kotamobagu Tahun 2017**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Formula	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	70	meningkatkan kesejahteraan sosial	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	jumlah PMKS yang diberikan bantuan / jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100%	-	-	-	70	50	50
	presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30		Presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	jumlah PMKS meperoleh bantuan sosial / jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%	-	-	-	70	30	30
	presentase PMKS yang mendapatkan bantuan KUBE atau kelompok jenis lainnya	30		presentase PMKS yang mendapatkan bantuan KUBE atau kelompok jenis lainnya	%	jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis / jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya menjadi peserta program KUBE x 100%	-	-	-	80	30	30
	presentase PMKS yang tertangani	20		presentase PMKS yang tertangani	%	jumlah PMKS yang tertangani /Jumlah PMKS yang ada x 100%	-	-	-	20	20	20
Meningkatnya korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Meningkatnya korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam satu tahun / jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam satu tahunx 100%	-	-	-	100	100	100

Untuk mendukung kebijakan prioritas tersebut, Dinas Sosial Kota Kotamobagu selaku bagian dari perangkat Pemerintah daerah Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD dalam hal ini beberapa program prioritas terkait dengan SKPD yaitu:

- 1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan,
 - 2). Peningkatan infrastruktur,
 - 3). Penanggulangan kemiskinan,
 - 4). Keadilan dan kesetaraan gender,
 - 5). Kerjasama regional dan nasional
- Faktor yang mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi meliputi ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang professional dan menguasai teknologi informatika, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki kompetensi akademik dan pengetahuan ketrampilan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - siap pakai bahkan berjiwa kewirausahaan yang tinggi.
 - Faktor pendukung lainnya dalam peningkatan infrastruktur yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial yang representative dan dapat menampung Penyandang Masalah Sosial untuk diberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha, termasuk renovasi Taman Makam Pahlawan Kotamobagu.
 - Faktor pendukung dan pendorong pencapaian program prioritas penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya tenaga professional bidang kesejahteraan social dan meningkatkan peran masyarakat dalam keterlibatan penanganan masalah social dengan merekrut tenaga pendamping program, memaksimalkan program-program yang berhubungan erat dengan penanggulangan kemiskinan.
 - Faktor pendukung dan pendorong kerjasama regional dan nasional adalah dengan terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas daerah, lintas sektor, dan lintas program melalui perjanjian kerjasama bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Faktor utama dalam mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Meningkatnya korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	25	Meningkatnya korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun/ jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun $\times 100\%$	-	-	-	25	25	25
Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	presentase panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	10	Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	Presentase sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	%	jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos / jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos $\times 100\%$	-	-	-	100	90	100
Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan lansia	presentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	70	meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia dan penyandang cacat	presentase lanjut usia terlantar dan Penyandang Cacat yang menerima jaminan sosial	%	jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun $\times 100\%$	-	-	-	70	70	70
Meningkatkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	presentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20	meningkatkan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	presentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	%	jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos/ jumlah WKBSM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos $\times 100\%$	-	-	-	20	20	20

2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indicator yang harus dicapai, maka tahun 2017 taerget pencapaian kinerja yang diinginkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kotamobagu Tahun 2017

Indikator SasaranRenstra	Formula
Presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	jumlah PMKS yang diberikan bantuan / jumlah PMKS yang seharusnya menerima batuan $\times 100\%$
presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	jumlah PMKS meperoleh bantuan sosial / jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial $\times 100\%$
presentase lanjut usia tidak potensial dan Penyandang Cacat yang menerima jaminan sosial	jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun $\times 100\%$
presentase panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos / jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos $\times 100\%$

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan

Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-4
Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	70
	presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70
Meningkatnya penyandang cacat serta lanjut usia terlanter yang telah menerima jaminan sosial	presentase lanjut usia terlanter dan penyandang cacat yang menerima jaminan sosial	%	70
Meningkatnya sarana prasarana kesehatan sosial bagi panti sosial	presentase panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	%	100

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indicator yang harus dicapai, maka pada tahun 2017 pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial TA 2017

No	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn2017
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS	presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	70
		presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70
2	Meningkatnya bagi lanjut usia dan penyandang cacat yang telah menerima jaminan sosial	presentase lanjut usia terlanter dan penyandang cacat yang sebagian terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70
3	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sosial bagi Panti sosial	Presentase sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	%	100

Program yang mendukung capaian sasaran adalah ssebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1,334,550,000	
	Pembinaan Eks Penyandang Penyankit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial)	165,310,000	
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	324.380,000	
3	Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	154,348,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah , maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017
		Target	Realisasi	
Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	70	88,57	126,53
presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	70	95	135,71

Pencapaian sasaran diukur dengan 2 indikator yang dapat dijelaskan berikut ini :

1. Indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

Pencapaian indicator ini yaitu jumlah jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun 2017 sebanyak 62 jiwa dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 70 jiwa sehingga realisasi kinerja pada indicator ini sebesar 88,57. target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 70% maka capaian kinerja pada indicator ini sebesar 126,53%. formula yang digunakan adalah jumlah PMKS yang diberikan bantuan / jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100%. Indikator sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kotamobagu. Nilai capaian prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terdiri dari :

1. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi kelompok minoritas. Yang dimaksud kelompok minoritas ialah Waria / banci yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Bantuan ini bersumber dari APBD Kotamobagu sebanyak 10 (sepuluh) / kelompok, pemberian bantuan ini berupa barang usaha yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendapatan kelompok minoritas. Pemberian bantuan ini diberikan Kepada 10 kelompok yang tersebar di 9 (sembilan) kelurahan sebagai berikut :

Table 3.1.1

Daftar Bantuan Sosial bagi Kelompok Minorotas

NO	KELURAHAN/DESA	VOLUME
1	Kel. Kotobangun	1 paket
2	Kel. Matali	1 paket
3	Kel. Biga	1 paket
4	Kel. Mogolaing	1 paket
5	Kel. Gogagoman	1 paket
6	Kel. Popundayan	1 paket
7	Desa Poyowa besar 1	1 paket
8	Desa Poyowa besar 1	1 paket
9	Desa Poyowa besar 1	1 paket

2. Pemberian bantuan sosial bagi Wanita Rawan Sosial ialah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Dengan kriteria sebagai berikut :

- Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun.
- Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
- Menjadi pencari nafkah utama keluarga
- Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup.

Meningkatnya kesejahteraan wanita rawan sosial ini diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh WRS setelah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target tersebut ialah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa barang usaha bagi 43 orang WRS yang tersebar beberapa kelurahan yaitu

Tabel 3.1.2

**Daftar Bantuan Sosial
Wanita Rawan Sosial**

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH
1	Kel. Kotobangun	3 orang
2	Kel. Matali	2 orang
3	Desa pontodon	2 orang
4	Desa pontodon timur	2 orang
5	Desa bilalang 2	1 orang
6	Kel. Kotamobagu	3 orang
7.	Kel. Gogagoman	5 orang
8	Kel. Mogolaing	4 orang
9	Kel. Molinow	1 orang
10	Kel. Mongondow	2 orang
11	Kel. Popundayan	4 orang
12	Desa kopandakan	3 orang
13	Desa poyowa besar 1	2 orang
14	Desa poyowa kecil	4 orang

3. Pemberian bantuan bagi eks warga binaan lembaga kemasyarakatan ialah seseorang yang telah keluar dari lembaga kemasyarakatan yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Meningkatnya kesejahteraan ex warga binaan lembaga kemasyarakatan ini diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh eks warga binaan lembaga kemasyarakatan setelah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target tersebut ialah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa barang usaha bagi 9 (Sembilan) orang eks warga binaan lembaga kemasyarakatan yang tersebar beberapa kelurahan yaitu kel. Matali sebanyak 1 (satu), desa pontodon Sebanyak 1 (satu) orang kel. Gogagoman sebanyak 3 (tiga) orang kel. Mongondow sebanyak 1 (satu) orang kel. Popundayan 1 (satu) orang, desa kopandakan sebanyak 1 (satu) orang.

4. Pemberian bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui KUBE Jasa (Kelompok Usaha Bersama) Program Keluarga Berencana (PKH) bersumber dari APBN. Dana yang dialokasikan sebanyak 8 (delapan) kelompok dan masing masing kelompok mendapatkan nilai bantuan sebesar Rp 20.000.000 / Kelompok. Sarana usaha KUBE ini tersebar di beberapa kelurahan/ desa yaitu Kel. Molinow, Kel. Mongondow, Kel. Popundayan, Kel. Kobo Besar, Kel. Matali, Kel. Upai, Kel. Gogagoman, Desa Moyang Tampoan
5. Pemberiaan bantuan Non Tunai bagi Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari APBN Kementrian Sosial RI dimana PKH memperoleh dana bantuan Non Tunai sebesar Rp 519.177 / KPM. Yang dimaksud KPM ialah Keluarga Penerima Manfaat. Jumlah KPM berdasarkan validasi dan verifikasi PKH tahun 2017 sebesar 2.138.

Perbandingan Terhadap Tahun Akhir Renstra.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 88,57 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 30 %, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 295,93 %

2. Indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Pencapaian indikator ini yaitu jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun pada tahun 2017 sebanyak 57 KK dari jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial sebanyak 70 KK sehingga realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 81,31 5 target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 80 % maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 81,42%. formula yang digunakan adalah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun / jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100% . Indikator sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar yang bersumber dari APBD Kotamobagu. Nilai capaian prosentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari :

1. Pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). Kriteria RSRTLH ialah rehabilitasi rumah tidak layak huni seperti lantai masih dari tanah, tembok masih terbuat dari bambu, atap rumah masih dari bambu. Bantuan Sosial RSRTLH ini yang berhak menerima ialah masyarakat miskin yang mempunyai tanah milik sendiri. Bantuan ini bersumber dari APBD kotamobagu. Kegiatan yang dilaksanakan guna capaian target tersebut ialah bantuan sandang, papan yang berupa bahan baku bangunan bagi 57 (lima puluh tujuh) KK yang tersebar beberapa kelurahan yaitu :

2.

Table 3.1.3
Daftar Bantuan Sosial

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

NO	DESA / KELURAHAN	VOLUME
1	Kel. Kotobangun	10 KK
2	Kel. Matali	8 KK
3	Desa kobo kecil	10 KK
4	Desa moyang	2 KK
5	Kel. Sinindian	4 KK
6	Kel. Tumubui	2 KK
7	Desa Moyang tampoan	2 KK
8	Kel. Motoboi besar	3 KK
9	Kel. Genggulang	2 KK
10	Desa sia	1 KK
11	Desa pontodon timur	2 KK
12	Kel. Mongkonai barat	1 KK
13	Kel. Gogagoman	1 KK
14	Kel. Popundayan	6 KK
15	Desa tabang	1 KK
16	Kel. Motoboi kecil	3 KK
17	Desa Poyowa Kecil	6 KK
18	Desa kopandakan	11 KK
19	Kel. Mongondow	2 KK
20	Desa Poyowa besar1	2 KK

3. Pemberian bantuan sosial bagi korban bencana sosial / alam . Selama tahun 2017 terdapat 164 kejadian bencana (banjir, kebakaran). Rincian kejadian bencana pada tahun 2017 sebagai berikut :

Table 3.1.4**Daftar Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial / Alam**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BENCANA
1	Syawal Tungkagi	Bilalang 1	Kebakaran
2	Burhanudin Luli	Poyowa Kecil	Banjir
3	Samin Pakaya	Sinindian	Banjir
4	Alfa Monintjka	Mogolaing	Banjir
5	Risna Paputungan	Sinindian	Banjir
6	Kurniawan Mokoagow	Sinindian	Banjir
7	Aswati Alendatu	Sinindian	Banjir
8	Abdul Aziz Efendi	Sinindian	Banjir
9	Jono Onda	Sinindian	Banjir
10	Husain Nurhamidin	Sinindian	Banjir
11	Nasim Manoppo	Sinindian	Banjir
12	Padli Oroh	Sinindian	Banjir
13	Yance Lumintang	Sinindian	Banjir
14	Deni Tani	Sinindian	Banjir
15	Hein Sual	Sinindian	Banjir
16	Yanto Manangin	Mogolaing	Banjir
17	Aisya Kaawan	Kotobangon	Banjir
18	Hartati Manoppo	Kotobangon	Banjir
19	Hena Lapadengan	Kotobangon	Banjir
20	Marliani Lamenca	Kotobangon	Banjir
21	Leni Mokodompit	Kotobangon	Banjir
22	Ratna Kulo	Kotobangon	Banjir
23	Altim M. Manoppo	Kotobangon	Banjir
24	Odi Watung	Tumobui	Banjir
25	Ijong Dondo	Poyowa Besar 1	Banjir
26	Irman Mamonto	Poyowa Besar 1	Banjir
27	Neldi Makalalag	Poyowa Besar 1	Banjir
28	Rusdi Simbala	Poyowa Besar 1	Banjir
29	Hasanudin Paputungan	Kobo Kecil	Banjir
30	Herd Sugeha	Kobo Kecil	Banjir
31	Ajih Mamonto	Kobo Kecil	Banjir
32	Ambu Mamonto	Kobo Kecil	Banjir
33	Debi Mamonto	Bungko	Banjir
34	Aripin Rauf	Bungko	Banjir
35	Rahman Linu	Bungko	Banjir
36	Sumitro Paputungan	Bungko	Banjir
37	Zainal Damopolii	Bungko	Banjir
38	Sum Paputungan	Bungko	Banjir
39	Rano Busura	Kopandakan 1	Banjir
40	Satria Lobut	Kopandakan 1	Banjir
41	Alar Mokoagow	Kopandakan 1	Banjir
42	Sutia Laute	Kopandakan 1	Banjir
43	Dahlan Bonuot	Kopandakan 1	Banjir
44	Labodu Bandu	Kopandakan 1	Banjir
45	Ensong Bonde	Kopandakan 1	Banjir
46	Jepri Kobandaha	Kopandakan 1	Banjir

47	Risman Tubuon	Kopandakan 1	Banjir
48	Rahimin Ondoling	Kopandakan 1	Banjir
49	Hendra Paguna	Kopandakan 1	Banjir
50	Samulel Age	Poyowa Kecil	Banjir
51	Sumarjono Paputungan	Poyowa Kecil	Banjir
52	Hidayat Bonok	Poyowa Kecil	Banjir
53	Derry Buntuan	Poyowa Kecil	Banjir
54	Hayati Kadamong	Pobundayan	Banjir
55	Wajib Damopolii	Pobundayan	Banjir
56	Oslan Korompot	Pobundayan	Banjir
57	Jainal Mokodompit	Pobundayan	Banjir
58	Lono Mamonto	Pobundayan	Banjir
59	Rahman Mokoagow	Pobundayan	Banjir
60	Sumiati Mamonto	Kotobangon	Banjir
61	Kede Mamonto	Kotobangon	Banjir

62	Hamsia Gobel	Kotobangon	Banjir
63	Moh. Ohairil Yaseh	Kotobangon	Banjir
64	Said Simbuang	Kotobangon	Banjir
65	Saomi Mohama	Sinindian	Banjir
66	Alan Kandoli	Sinindian	Banjir
67	Siane Sumilat	Sinindian	Banjir
68	Fery Walandow	Sinindian	Banjir
69	Dimas Mokoagow	Sinindian	Banjir
70	Yoce Makalalag	Matali	Banjir
71	Maryam Vansolang	Matali	Banjir
72	Pajawa Makalalag	Matali	Banjir
73	Irwan Makalalag	Matali	Banjir
74	Ramlah Monoarfa	Matali	Banjir
75	Hamusa Makalalag	Kobo Besar	Banjir
76	Sumiati	Kobo Besar	Banjir
77	Selvi Mokoginta	Kobo Besar	Banjir
78	Haema Mamonto	Kobo Kecil	Banjir
79	Moh. Nuriksan Dakogalang	Kobo Kecil	Banjir
80	Salma Ganggai	Motoboi Besar	Banjir
81	Ramli Mamonto	Motoboi Besar	Banjir
82	Roni Dubaili	Biga	Banjir
83	Joyo Damopolii	Biga	Banjir
84	Marson Dili	Gogagoman	Banjir
85	Beni Ferdi Manoppo	Gogagoman	Banjir
86	Yahelskiel Kastilong	Gogagoman	Banjir
87	Roberto Kastilong	Gogagoman	Banjir
88	Martinusi Kastilong	Gogagoman	Banjir
89	Aryandi David Kastilong	Gogagoman	Banjir
90	Mike Tisen Kastilong	Gogagoman	Banjir
91	Rita Maniku	Gogagoman	Banjir
92	Joni Suma	Gogagoman	Banjir
93	Maekel Molohing	Gogagoman	Banjir

94	Alfinus Manangsang	Gogagoman	Banjir
95	Alfiandi Manangsang	Gogagoman	Banjir
96	Jeri Evander Manangsang	Gogagoman	Banjir
97	Donal Manangsang	Gogagoman	Banjir
98	Feri Makinggung	Gogagoman	Banjir
99	Yolfianus Makaado	Gogagoman	Banjir
100	Kenedi Masing	Gogagoman	Banjir
101	Fendi Horisondak	Gogagoman	Banjir
102	Maku Bahute	Gogagoman	Banjir
103	Deni Harisondak	Gogagoman	Banjir
104	Jefri Randi Manopo	Gogagoman	Banjir
105	Irvan Manangsang	Gogagoman	Banjir
106	Junius Budikasim	Gogagoman	Banjir
107	Novi Budikasim	Gogagoman	Banjir
108	Yohanis Budiman	Gogagoman	Banjir
109	Suna Amingo	Gogagoman	Kebakaran
110	Dodi Sulaeman	Mongondow	Kebakaran
111	Bapak Idon	Gogagoman	Kebakaran
112	Darwin Thalib	Gogagoman	Kebakaran
113	Herman Ali	Gogagoman	Kebakaran
114	Hendra Ali	Gogagoman	Kebakaran
115	Yusuf Akune	Gogagoman	Kebakaran
116	Ilyar Umar	Gogagoman	Kebakaran
117	Paimin Muhammad	Gogagoman	Kebakaran
118	Umar Lajamela	Gogagoman	Kebakaran
119	Yunus Akuba	Gogagoman	Kebakaran
120	Nasir Yusuf	Gogagoman	Kebakaran
121	Rahman Saleh	Gogagoman	Kebakaran
122	Abubakar Ahmad	Gogagoman	Kebakaran
123	Kasmil Lailu	Gogagoman	Kebakaran
124	Karim Kadir	Gogagoman	Kebakaran
125	Arpan Haji	Gogagoman	Kebakaran

126	Hasan Kina	Gogagoman	Kebakaran
127	Feibi Suratinoyo	Gogagoman	Kebakaran
128	Yusuf Laiya	Gogagoman	Kebakaran
129	Pangky Harun	Gogagoman	Kebakaran
130	Rusni Lahilote	Gogagoman	Kebakaran
131	Septian Mohuangilo	Gogagoman	Kebakaran
132	Bakri Kumal	Gogagoman	Kebakaran
133	Saidi Dalonggo	Gogagoman	Kebakaran
134	Agus Suito Saleh	Gogagoman	Kebakaran
135	Romi Mandey	Gogagoman	Kebakaran
136	Yasmin Talib	Gogagoman	Kebakaran
137	Kadir Midu	Gogagoman	Kebakaran
138	Dedi Darumeat	Gogagoman	Kebakaran
139	Tomi Bakri	Gogagoman	Kebakaran
140	Indra Eko	Gogagoman	Kebakaran

141	Geral Boulu	Gogagoman	Kebakaran
142	Arifin Adolo	Gogagoman	Kebakaran
143	Sunandar Mantamau	Gogagoman	Kebakaran
144	Amana Igrisa	Gogagoman	Kebakaran
145	Awan Musa	Gogagoman	Kebakaran
146	Rukaini Manai	Kotobangon	Kebakaran
147	Firman Wartabone	Gogagoman	Kebakaran
148	Adrianto Abd Halim	Motoboi Kecil	Kebakaran
149	Musmar Korompot	Kotobangon	Banjir
150	Manoppo-Kawaan	Kotobangon	Banjir
151	Doni Manoppo	Kotobangon	Banjir
152	Abas Padja	Kotamobagu	Banjir
153	Tasman Husain	Kotamobagu	Banjir
154	Iwan Amak	Kotamobagu	Banjir
155	Salma Padja	Kotamobagu	Banjir
156	Rajab Padja	Kotamobagu	Banjir
157	Iwan S. Mokoginta	Biga	Banjir
158	H. Dadu	Biga	Banjir
159	Ismail Manoppo	Biga	Banjir
160	S. Dadu	Biga	Banjir
161	B. Lihawa	Biga	Banjir
162	R. Damopolii	Biga	Banjir
163	R. Yassa	Biga	Banjir
164	Mahar Mongilong	Mogolaing	Kebakaran

Perbandingan Terhadap Tahun Akhir Renstra.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 81,42 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 70 %, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 271, 49%

Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017
		Target	Realisasi	
presentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	70	130	185,71

Pencapaian sasaran diukur dengan 1 indikator yang dapat dijelaskan berikut ini :

1. Pencapaian indicator ini yaitu jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun pada tahun 2017 sebanyak 91 orang dari jumlah penyandang cacat

fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun 70 orang sehingga realisasi kinerja pada indicator ini sebesar 130 % target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 70 % maka capaian kinerja pada indicator ini sebesar 185,71%. formula yang digunakan adalah jumlah penyandang cacat fisik mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / jumlah penyandang cacat fisik mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun x 100% . Indikator sasaran penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima jaminan sosial yang bersumber dari APBD Kotamobagu

1. Pemberian jaminan sosial bagi 30 (tiga puluh) orang penyandang cacat serta 61(enam puluh satu) orang yang bersumber dari APBD Kotamobagu. Kegiatan yang dilaksanakan guna capaian target tersebut ialah bantuan sosial kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan yang tersebar di beberapa kelurahan sebagai berikut :

Table 3.1.5
Daftar Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat dan Lansia

NO	DESA / KELURAHAN	PENYANDANG CACAT	LANSIA	KET
1	Kel. Kobo besar	2	-	
2	Kel. Matali	1	4	
3	Kel. Genggulang	1	2	
4	Desa pontodon	1	4	
5	Desa sia	2	1	
6	Kel. Gogagoman	3	6	
7	Kel. Molinow	2	4	
8	Kel. Mongkonai	2	2	
9	Kel. Mongkonai barat	2	1	
10	Kel. Mongondow	2	2	
11	Kel. Popundayan	3	2	
12	Kel. Motoboi kecil	4	2	
13	Desa kopandakan	3	2	
14	Desa bungko	1	-	
15	Desa poyowa besar satu	2	2	
16	Desa poyowa kecil	1	3	
17	Kel. Mogolaing		2	
18	Kel. Biga		1	
19	Kel. Upai		1	
20	Desa bilalang 1		1	
21	Desa bilalang 2		1	
22	Kel. Kotobangun		2	
23	Kel. Sinindian		4	
24	Kel. Tumubui		2	
25	Desa kobo kecil		3	
26	Desa moyang tampoan		2	
27	Kel. Motoboi besar		3	

Perbandingan Terhadap Tahun Akhir Renstra.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 130 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 70 %, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 185,71 %

Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesehatan sosial.

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017
		Target	Realisasi	
presentase panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100	100	100

Pencapaian sasaran diukur dengan 1 indikator yang dapat dijelaskan berikut ini :

2. Pencapaian indicator ini yaitu jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan saran dan prasarana pelayanan kesos pada tahun 2017 sebanyak 2 panti dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos tahun 2017 2 panti sehingga realisasi kinerja pada indicator ini sebesar 100 % target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 100 % maka capaian kinerja pada indicator ini sebesar 100 %. formula yang digunakan adalah jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan saran dan prasarana pelayanan kesos / jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100%. Pencapaian sasaran ini Dinas Sosial Kotamobagu memberikan bantuan sosial berupa sarana dan prasarana penunjang dan bahan makanan / sembako panti asuhan yang ada di Kotamobagu yaitu : Panti Sosial MOTOTANOBAN dengan alamat : Drs Jhony Tani kel. Kotamobagu, kec. Kotamobagu barat dan Panti Sosial AR-RAHMAN dengan alamat Jl. Baharudi hamid kel. Mongkonai barat kec. Kotamoabgu barat.

Perbandingan Terhadap Tahun Akhir Renstra.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 100 %, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 100%

Table 3.1.6
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kotamobagu TA 2017

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	%
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	1.334.550.000	1.474.622.020	1.473.938.950	99,95

		Program pembinaan eks penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	165.310.000	236.060.000	229.970.250	97,42
Rata rata realisasi anggaran						98,68
2.	Meningkatnya penyandang cacat fisik seras lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana public bagi penyandnag cacat dan lansia	324.380.000	262.599.200	262.477.900	99,94
3.	Meningkatnya panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 1. Pemberiaan bantuan sarana dan prasarana penunjang panti asuhan / panti jompo	67.408.000	1.800.000	1.800.000	100
		2. Pemberian bantuan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan / panti jompo	86.940.000	42.169.700	40.625.100	96,34
Rata rata realisasi anggaran						98.17

Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kotamobagu tahun 2017 serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kotamobagu.

Table 3.1.7
Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	(5=3-4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	121,42	98,68	22,74
2	Meningkatnya penyandang cacat serta lanjut usia terlantar yang menerima jaminan sosial	185,71	99,94	85,77
3	Meningkatnya panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	100	98,17	1,83

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governace) Dinas Sosial Kotamobagu Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kotamobagu Tahun 2017 ini menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kotamobagu dan Evaluasi terhadap kinerja yang dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Kotamobagu menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari indikator dengan nilai 126,53 % atau interpretasi melampaui target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 185.71 % atau interpretasi melampaui target.
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi mencapai target.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kotamobagu ini, dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Sosial Kotamobagu kepada pihak pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lainnya yang telah mengambil bagian dengan partisipasi aktif untuk membangun kotamobagu.